

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN DISERTASI	ix
DAFTAR ISI	lxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. KEGUNAAN PENELITIAN	11
1. Secara Teoritis	11
2. Secara Praktis	11
E. KERANGKA KONSEPTUAL	12
F. KERANGKA TEORI	19
G. ORISINALITAS PENELITIAN	39
H. KERANGKA PEMIKIRAN	42
I. METODE PENELITIAN	43
J. SISTEMATIKA PENULISAN	51
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	55
B. KAPAL LATIH	55
2. Pengertian Kapal Latih	55
3. Peningkatan Kualitas Internal dan Eksternal BPSDMP Melalui Kapal Latih	58
4. Penyiapan SDM Kapal Latih Taruna Oleh Pusbang SDM Perhubungan Laut	66
C. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN (SDMP)	69
1. Peran Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (SDMP)	69
2. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (SDMP)	70
3. Pengembangan Sarana Prasarana	73
4. Pengembangan Kurikulum	77
D. KAPAL LATIH MERUPAKAN UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH PELAYARAN	81
1. Mutu Pendidikan Melalui Kapal Latih Guna Peningkatan Skill Taruna Pelayaran	
2. Penjaminan Mutu Pendidikan	81
3. Manajemen Mutu Pendidikan	92
4. Unsur-Unsur Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah Pelayaran	96
5. Manajemen Personalia Pendidikan Di Sekolah pelayaran	99
6. Manajemen Taruna didik	111
7. Manajemen Kurikulum Pendidikan Di Sekolah Pelayaran	119
8. Manajemen Keuangan Pendidikan Di Sekolah pelayaran	123
9. Manajemen Kapal Latih Sebagai Sarana Prasarana Pendidikan	130

10. Arah dan Strategi Pengembangan Sekolah Pelayaran	139
11. Pengembangan Organisasi/Biro Pengelola Kapal Latih	143
C. PENEGAKAN HUKUM DALAM KONSTRUKSI HUKUM BARU KAITANNYA DENGAN KAPAL LATIH	145
1. Penegakan Hukum	145
2. Teori Penegakan Hukum	147
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	149
D. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK	150
1. Pengertian Kebijakan Publik	150
2. Tahapan – Tahapan Kebijakan	154
3. Analisis Kebijakan Publik	157
4. Model Kebijakan Publik	163
5. Dampak Kebijakan Publik	165
BAB III PENGELOLAAN KAPAL LATIH MILIK BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN (BPSDMP)	170
A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	170
B. VISI DAN MISI PRESIDEN	176
C. VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	178
1. Visi	178
2. Misi	179
3. Tujuan	180
D. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019	180
E. VISI DAN MISI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019	180
F. SASARAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	181
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	185
H. KEBIJAKAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	188
I. STRATEGI BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN	188
J. PROGRAM DAN KEGIATAN BPSDMP PERHUBUNGAN	193
K. CAPAIAN KINERJA BPSDMP	195
L. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT	216
M. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN	217
N. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2015- 2019	219
1. Landasan Hukum	219
2. Target Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut Tahun 2015 – 2019.....	223
O. PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT	226
1. Kebutuhan SDM Transportasi Laut	227
2. Target Lulusan	233

P. KEGIATAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN 2015-2019	258
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN KAPAL LATIH SAAT INI	263
A. PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN KAPAL LATIH SAAT INI MASIH MENGUNAKAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN ATAU RUPIAH MURNI OLEH UPT DIKLAT	263
B. TIDAK ADANYA BALAI PENGELOLA KAPAL LATIH.....	264
C. PENGELOLAAN DENGAN MEMBUAT MOU DENGAN PERUSAHAAN PELAYARAN BUMN BELUM PERNAH DILAKUKAN	265
D. LEMAHNYA MODEL PENGELOLAAN KAPAL LATIH OLEH UPT DIKLAT (OPSI 1)	266
E. LEMAHNYA MODEL PENGELOLAAN KAPAL LATIH DENGAN PEMBENTUKAN SATKER BARU BALAI PENGELOLA KAPAL LATIH (OPSI 2)	270
F. LEMAHNYA MODEL PENGELOLAAN KAPAL LATIH DENGAN PERUSAHAAN PELAYARAN BUMN (OPSI 3)	274
G. PENYUSUNAN SOP PENGELOLAAN KAPAL LATIH MASIH DALAM PROSES	279
1. <i>Standar Operasional Prosedur (SOP)</i>	279
2. Dasar Hukum	280
3. Tujuan	282
4. Tanggung Jawab	283
H. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KAPAL LATIH BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN	307
BAB V KONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN KAPAL LATIH MILIK BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN (BPSDMP) YANG BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT	652
BAB VI PENUTUP	658
A. KESIMPULAN	658
B. SARAN	659
C. IMPLIKASI KAJIAN DISERTASI	660
DAFTAR PUSTAKA	661
LAMPIRAN	
CURRICULUM	VITAE